



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHIDAYAT MASKAT
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 90692

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 532.000.000

1. Tanah Seluas 1175 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 435 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. Tanah Seluas 382.5 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.130.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 174.946.652**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 911.576.652**III. HUTANG** Rp. 24.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 887.576.652



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.